

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti ambil dalam melakukan penelitian ini yaitu di LPP RRI Palembang, yang bertempat di Jl. Radio KM.4 No.2, 20 Ilir D. IV, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151, Indonesia.

B. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI)

Radio Republik Indonesia (RRI) adalah satu-satunya radio yang menyanggah nama negara, siarannya ditujukan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Cikal bakal lahirnya RRI di mulai dari organisasi penyiaran Radio Jepang pada saat masih dalam masa penjajahan jepang yang digunakan sebagai alat propaganda untuk kepentingan militer jepang dengan sebutan *Hoso Kyoku* yang berpusat di Jakarta. Kelahiran RRI tidak terlepas dari situasi yang terjadi pada saat itu, yaitu kekalahan Jepang terhadap sekutu.

Sementara itu disisi lain ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, para pemimpin radio siaran yang tersebar diseluruh pulau Jawa mengadakan pertemuan dan mengusulkan agar semua radio siaran yang ada di pulau Jawa diserahkan kepada pemerintahan Indonesia yang sudah merdeka. Pertemuan para pemimpin radio siaran tersebut berlangsung sejak tanggal 10 September 1945 di Jakarta dan dihadiri oleh utusan radio siaran dari berbagai daerah seperti Solo yang diwakilkan oleh Maladi dan Sutardi, Yogyakarta yang

diwakilkan oleh Sudomo Marto serta Surabaya yang diwakilkan oleh Suhardi. Malam hari pada tanggal 10 September 1945 para utusan bertemu dengan Mr. Oetojo Ramelan sebagai pemimpin tertinggi *Hoso Kyoku* (radio siaran Jepang) untuk memberitahukan rencana rapat para angkasawan radio dan disetujui oleh Mr. Oetojo Ramelan, namun menyarankan lebih dahulu meminta persetujuan Presiden Soekarno. Pada tanggal 11 September 1945 pagi hari, para pemimpin radio dari berbagai daerah itu berangkat untuk bertemu Presiden Soekarno. Namun, ketika menghadap para delegasi hanya bertemu dengan juru bicara pemerintah Sukarjo Wirjopranoto memberitahukan, bahwa hari itu presiden tidak dapat menerima delegasi radio karena sedang mengadakan rapat dengan para menteri.

Malam hari pada tanggal 11 September 1945 akhirnya Radio Republik Indonesia resmi didirikan pada rapat delegasi yang diadakan di rumah Adang Kadarusman yang dipimpin oleh Dr. Abdulrachman Saleh yang menghasilkan keputusan untuk meneruskan perjuangan Indonesia melalui siaran radio dengan mendirikan Radio Republik Indonesia dan memilih Dr. Abdulrachman Saleh sebagai pemimpin umum RRI pertama. Berdasarkan pada landasan historis itulah, maka pada setiap tanggal 11 September selalu diperingati sebagai hari radio atau dengan kata lain lahirnya RRI. Tekad yang dicanangkan para delegasi untuk mendirikan RRI adalah sebuah momentum yang sangat tepat karena Indonesia baru saja merdeka dan membutuhkan sebuah radio siaran yang dapat menyuarakan kepentingan negara Indonesia baik kepada masyarakat Indonesia itu sendiri maupun kepada masyarakat

internasional, sehingga pada awal kelahirannya RRI memposisikan dirinya sebagai “Radio Perjuangan”.

Delegasi radio yang ikut dalam pertemuan adalah: Dr.Abdulrachman Saleh, Adang kadarusman, Soehardi, Soetarji Hardjolukita, Soemarmadi, sudomomarto, Harto dan Maladi. Dr.Abdulrachman Saleh adalah ketua delegasi.Dalam pertemuan itu telah diuraikan garis besar rencana sebagai berikut:

1. Tentara Inggris sebagai kuasa sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September.Melihat tugas mereka di Indonesia,sudah dapat diperhitungkan akan timbul bentrokan-bentrokan antara pasukan Inggris dengan lasykar rakyat dan rakyat pada umumnya karena rakyat menganggap kedaulatan Republik Indonesia dilanggar dengan masuknya tentara asing di wilayah Republik Indonesia.
2. Setelah tentara Inggris menyelesaikan tugasnya, mereka akan diganti dengan tentara Belanda yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia. Pertempuran besar-besaran akan berkobar di seluruh Indonesia.
3. Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut,kekuatan utama bagi Republik Indonesia adalah RAKYAT.Adalah kewajiban pemerintah untuk memimpin perjuangan dan menggerakkan kekuatan rakyat dengan strategi dan taktik yang tepat.
4. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut,pemerintah harus mempunyai hubungan yang cepat dan luas.Satu-satunya alat komunikasi yang dapat memenuhi syarat tersebut hanyalah RADIO.Alat-alat komunikasi lainnya

seperti telepon,telegraf,kereta api,pera dan lain-lain,selain kurang cepat,juga dapat terputus dengan mudah dalam pertempuran-pertempuran.

5. Berdasarkan pemikiran dan perhitungan tersebut,para pemimpin radio dari 8 *Hoso Kyoku* di Jawa bertekad,untuk meng-organisir siaran radio, sebagai alat perjuangan dan alat komunikasi dengan rakyat.
6. Untuk tujuan tersebut,akan dibentuk organisasi nasional siaran radio yang bersifat persatuan.
7. Studio dan pemancar-pemancar radio *Hoso Kyoku* akan dijadikan modal operasi persatuan tersebut yang akan menuntut penyerahan alat-alat tersebut dari Jepang.
8. Struktur organisasi,personalia,strategi peluangan menghadapi Inggris dan kemudian Belanda akan dibicarakan dalam konperensi.
9. Kepada pemerintah diminta persetujuannya atas rencana tersebut,serta petunjuk-petunjuk dan bantuan dalam penyelesaiannya dengan pihak Jepang mengenai penyerahan pemancar radio.

Tanggapan para Menteri dan Sekretaris Negara terhadap penjelasan delegasi radio dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mereka tidak menduga, delegasi radio akan mengajukan rencana yang mencakup aspek politik yang demikian luasnya.
- b. Dikatakan,pemerintah sedang memikirkan pengaturan media masa pers, radio dan lain-lain. Untuk itu telah dibentuk sebuah panitia negara yang diketahui Adam Malik. Tetepi, panitia tersebut belum sempat merumuskan suatu konsepsi/rencana yang konkrit.

- c. Mengenai penyerahan pemancar-pamancar radio dari tangan Jepang memerlukan pemikiran yang mendalam. Alat-alat tersebut sudah di daftar sebagai inventaris Sekutu dan memerlukan pembicaraan dengan pihak Sekutu. Penguasaan alat-alat tersebut dapat mengakibatkan bentrokan dengan Jepang.
- d. Perhitungan delegasi radio, bahwa kedatangan tentara Inggris akan membawa pertempuran-pertempuran tidak dapat diterima oleh pemerintah.

Dalam hubungan ini, delegasi radio mengambil sikap akan jalan terus, dengan rencana berdasarkan perhitungan peperangan. Pada akhir pertemuan, Dr. Abdulrachman Saleh membuat resume sebagai berikut:

1. Pada satu saat akan ditentukan lebih lanjut, akan menyatakan diri menjadi pegawai Republik Indonesia.
2. Delegasi akan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia, yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa.
3. Radio Republik Indonesia akan dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah RI untuk alat hubungan dengan rakyat.
4. Semua hubungan antara Pemerintah dengan Radio Republik Indonesia, hendaknya disalurkan hanya melalui Dr. Abdulrachman Saleh.
5. Berhubungan dengan status penyiaran radio dalam pemerintahan belum ditetapkan, maka untuk sementara waktu akan bekerja sebagai organisasi tersendiri, dengan permohonan agar Pemerintah memberikan bantuan.

6. Berhubung dengan kedatangan tentara Inggris yang mungkin disusul oleh tentara Belanda, maka segala usaha akan diselenggarakan dengan memperhitungkan faktor pertempuran.
7. Mengenai penyerahan alat-alat radio dari tangan Jepang akan diatur sendiri, dan dimana perlu hendaknya Pemerintah memberi bantuan.

Walaupun mengenai beberapa hal Pemerintah tidak sependapat, namun di sanggupi akan memberi bantuan kepada Radio Republik Indonesia.

Dengan menempatkan dirinya sebagai radio perjuangan, maka tujuan RRI pada masa awalnya adalah menjadikan radio sebagai alat perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia untuk membela dan menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan negara khususnya, alat atau sarana untuk menggalang persatuan nasional dan membangun cita-cita kemerdekaan umumnya, serta sarana komunikasi antara pemerintah dengan rakyat dan rakyat dengan rakyat.

Disamping itu radio adalah alat pembinaan jiwa dan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan norma dan moral siara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan aliran dalam membina penyiaran radio. Dan di dalam keadaan apapun siaran RRI tidak boleh lenyap dari udara sehingga dikenal dengan semboyan "Sekali Di Udara Tetap Di Udara".

Kiprah RRI sebagai alat perjuangan juga terlihat pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1945-1950. RRI menjadi corong pemerintah dalam menyebarkan kepentingan pemerintah baik ke dalam maupun ke

luar negeri. Sedangkan pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) RRI melakukan penataan diri dengan memperbaiki sarana dan prasarana. Selain itu juga menyiapkan program-program yang terencana dengan baik dan bersifat idealis seperti mengangkat kesenian dan kebudayaan daerah.

Pada masa Demokrasi Termimpin (1959-1968) RRI mengalami situasi yang kurang baik karena begitu kuatnya kepentingan pemerintah atau penguasa pada saat itu yang harus dilayaninya. Sesaat itu tugas yang dibebankan kepada RRI lebih banyak mengarah kepada penyebaran pidato-pidato kepresidenan yang *indoktrinatif*.

Selanjutnya pada masa orde baru (1969-1998) manajemen RRI menggariskan acara-acara yang dipersembahkan RRI hanya siaran yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain RRI sebagai suatu stasiun radio tidak pernah dapat melepaskan diri dari control pemerintah sehingga RRI corong kebijakan penguasa saat itu.

Pada tahun 1998 terjadi perubahan sosial politik dan reformasi di Indonesia yang membawa pengaruh ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek tersebut adalah media massa. Setelah rezim Orde Baru tumbang, masyarakat Indonesia mengalami *Euphoria* politik sehingga kebebasan menjadi kata yang selalu diucapkan yang member pengaruh kepada kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat bagi masyarakat Indonesia. Perubahan sosial politik ini membawa perubahan di lingkungan RRI. Dengan dikeluarkannya PP No 37 Tahun 2000 maka RRI berganti menjadi perusahaan jawatan (*perjan*) yang independen, mandiri dan

tidak lagi menjadi corong dan dikendalikan oleh pemerintah dengan prinsip yang melayani kepentingan masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2002 ditetapkan status RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang merupakan bagian dari system penyiaran nasional, guna menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas RRI No 009/DEWASRRI/2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.¹

C. Visi, Misi dan Logo LPP RRI

VISI LPP RRI

Terwujudnya RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang terpercaya dan mendunia

MISI LPP RRI

1. Memenuhi hak warga negara memperoleh berita dan informasi yang objektif dan akurat
2. Memenuhi hak warga negara memperoleh siaran yang mencerdaskan, mencerahkan dan memberdayakan serta berpihak kepada kelompok rentan dan disable

¹ Sumber Dokumentasi LPP RRI Palembang

3. Menyelenggarakan siaran yang menjamin kebhinekaan dan identitas nasional
4. Menyelenggarakan siaran hiburan yang sehat
5. Meningkatkan layanan dan jangkauan siaran yang mudah diakses masyarakat di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan pesisir
6. Memperkuat siaran luar negeri untuk mempromosikan Indonesia beserta ideologi
7. Pancasila dan menghadirkan dunia ke Indonesia sesuai dengan politik luar negeri
8. Mengoptimalkan teknologi penyiaran untuk mendukung terselenggaranya siaran RRI yang mampu menjangkau seluruh wilayah NKRI dan dapat diakses oleh masyarakat dunia
9. Meningkatkan kualitas tata kelola LPP RRI sesuai dengan prinsip good public governance
10. Mengembangkan SDM professional
11. Mengembangkan strategi komunikasi dan promosi
12. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan sesuai aturan perundangan yang berlaku.²

² <http://pusdatin.rrri.co.id/file/docs/66/VISI%20MISI.pdf>, diakses pada 26 Desember 2018, 21:25

LOGO LPP RRI



Gambar 2.1 Logo LPP RRI

1. Bentuk Empat Persegi Panjang Sudut dan Garis Tepi

Empat persegi panjang menggambarkan kekokohan dan solidaritas. Sudut yang membulat (tidak runcing) melambangkan fleksibilitas RRI. Tidak adanya garis tepi atau batas ataupun bingkai menunjukkan independensi RRI, serta keterbukaan RRI untuk dapat bekerja sama dengan berbagai pihak.

2. Tulisan (*Font-Type*) "RRI"

Huruf yang dirancang khusus (tanpa padanan dengan pihak lain), menunjukkan RRI yang kokoh, tegas, dinamis, dan selalu bergerak maju.

1. Gambaran Pancaran Radio

Sebuah image yang menggambarkan kuatnya pancaran siaran radio RRI yang makin meluas. Tiga lapis pancaran yang terlihat pada logo juga melambangkan Tri Prasetya RRI.

2. Warna Biru, Biru Langit Dan Putih

untuk mempertahankan tradisi. Warnabiru dipilih sebagai warna korporat RRI. Warna Biru dan biru langit ini melambangkan universalitas RRI, sifat mengayomi, teduh dan dapat dipercaya. Warna putih pada tulisan RRI melambangkan kejujuran, kebenaran, keberimbangan dan akurasi.³

D. Sejarah LPP RRI Palembang dan Masuknya Konsep Audio Visual (TV) di LPP RRI Palembang

Pertama kali di Sumatera Selatan didirikan pemancar radio yaitu pada masa penjajahan Jepang di daerah Talang Semut yang diselenggarakan oleh radio Nippon Hoshiyokiku. Seiring dengan diproklamakan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 24 Agustus 1945 Dr. A.K.Gani sebagai Residen Riang pertama kali di Palembang. Pengangkatan ini berdasarkan surat keputusan yang dibawa oleh Dr.Amir, Mr.Teuku, Mr.Hasan dan Mr.Abas. pemancar radio milik yang berkekuatan 25 watt direbut oleh pejuang-pejuang Sumatera Selatan berdasarkan isi yang tersirat dalam surat pengangkatan Dr.A.K.Gani. pada bulan Maret berkumandangnya radio di udara dengan Calling “Disini Pemancar Radio Palembang” berkat bantuan teknisi LIM dan ISA di daerah 9 Ilir Lorong Kebangkitan Palembang. Dengan gelombang 37 meter yang berkekuatan 300 watt yang diperkuat dengan pemancar radio gelombang yang berkekuatan 44 meter 600 watt.

³ SDM LPP RRI Palembang

Januari 1947 Belanda kembali menyerang Kota Muara Enim. Pada bulan Juli pemancar radio di Muara Enim dipindahkan ke Kota Curup. Tahun 1949 dibangun pemancar radio baru dengan panggilan “Disini Radio Perjuangan Bukit Barisan” oleh AURI dan PTT. Dari sinilah terjadi perang siaran radio antar radio Bukit Barisan. Karena Belanda merasa terganggu maka pemancar radio Bukit Barisan dari Muara Enim ke Air Kepras Air Putih di Kabupaten Rejang Lebong. Lalu dari sinilah dilakukan hubungan keluar daerah seperti pulau Jawa, Jambi, Aceh, dan terutama dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia secara Telegrafis.

Studio dan peralatan pemancar radio Talang Jawa Lama No. 7 Palembang juga diserahkan kepada pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat) yang mewakili pemerintah pusat sehingga bernama RRIS (Radio Republik Indonesia Serikat) yang kemudian diubah menjadi RRI (Radio Republik Indonesia). Karena tidak memenuhi syarat lagi maka dipindahkan ke Jln. Merdeka 2 dengan 2 unit pemancar berkekuatan 10 Kw dengan gelombang 61,79 meter dan 1 Kw dengan pemancar gelombang 123,45 meter. Kemudian pada tahun 1953 dipindahkan ke KM. 5 dan pada tahun 1962 studio di Jalan Radio 2 KM. 4 diresmikan Presiden Soekarno sebagai stasiun Regional 1 Palembang. Stasiun regional Palembang terus membenahi diri, sehingga radio tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Pada tanggal 20 Mei 1962 siaran sepenuhnya diselenggarakan dari gedung hingga sekarang.

E. Program Acara LPP RRI Palembang

Program acara LPP RRI Palembang dibagi menjadi 5 bagian :

1. Pro 1 (Pusat Pemberdayaan Masyarakat) dengan frekuensi 92,4 FM
2. Pro 2 (Kreatifitas Anak Muda) dengan frekuensi 91,6 FM
3. Pro 3 (Jaringan Berita Nasional) dengan frekuensi 93,7 FM
4. Pro 4 (Pusat Kebudayaan Indonesia) dengan frekuensi 88,4 FM
5. VOI (Citra & Martabat bangsa didunia internasional siaran setiap hari dengan 8 bahasa asing)
6. Studio Produksi LN(Jembatan informasi Indonesia - LN dan LN – Indonesia)
7. RRINET (Tonton Apa Yang Anda Dengar)

F. Tugas dan Fungsi

Struktur LPP RRI Palembang terdiri dari :

1. Kepala LPP RRI

Kantor LPP RRI berkedudukan di Ibukota Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Kantor LPP RRI memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditentukan dewan Direksi.

2. Kepala Bagian Tata Usaha

a. Fungsi Jabatan

Mengelola atau merencanakan, mengorganisasi segala sumber daya manusia, memimpin sesuai prosi tanggung jawab, serta mengevaluasi

program kerja dan kegiatan di RRI Palembang secara efektif, efisien, dan akuntabilitas.

b. Kepala Bagian Tata Usaha Berwenang

Memberikan masukan mengenai rencana program kerja yang berhubungan dengan tata usaha dan memonitorkan pelaksanaan kegunaan tata usaha, melakukan inovasi dalam program kerja, menyetujui dan menolak usulan kegiatan dibidang tata usaha.

c. Kepala Bagian Tata Usaha Bertugas Sebagai Berikut

- 1) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas bagian tata usaha, administrasi, dan kearsipan.
- 2) Melakukan koordinir dalam perencanaan, mengatur, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan.
- 3) Melakukan pembinaan, pengawasan kepada semua pegawai di lingkungan bagian tata usaha.

3. Kepala Subbagian SDM

a. Fungsi Jabatan

Memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja kepegawaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan Subbag Kepegawaian.

b. Kepala Subbagian Berwenang

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Subbag kepegawaian dan memastikan terwujudnya koordinasi antar bidang kerja dan kantor pusat, memantau pelaksanaan program kepegawaian.

- c. Kepala Subbagian SDM bertugas sebagai berikut
 - 1) Menyusun rencana kerja SDM
 - 2) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - 3) Melakukan pengecekan laporan bulanan dan tahunan LPP RRI Palembang
- 4. Kepala Subbagian Keuangan
 - a. Fungsi Jabatan

Memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan Subbag Keuangan.
 - b. Kepala Subbagian Keuangan Berwenang

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Subbag keuangan, memastikan terwujudnya koordinasi antar bidang kerja dan kantor pusat, serta memantau pelaksanaan program kerja keuangan.
 - c. Kepala Subbagian Keuangan bertugas sebagai berikut
 - 1) Melaksanakan tata usaha keuangan rutin
 - 2) Mengadakan pengawasan kegiatan kepada semua kegiatan keuangan yang dikelola
 - 3) Melaporkan semua kegiatan pengelolaan keuangan rutin

5. Kepala Subbagian Umum

a. Fungsi Jabatan

Memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Subbag umum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan Subbag umum.

b. Kepala Subbag Umum Berwenang

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan subbag umum, memantau pelaksanaan program kepegawaian, memberikan penilaian kepada bawahan (SKP).

c. Kepala Subbagian Umum bertugas sebagai berikut

- 1) Mengkoordinir Subbagian Umum
- 2) Melakukan penyusunan rencana pengadaan peralatan
- 3) Melakukan penyusunan tata ruang kerja dan fasilitas kantor

6. Kepala Bidang Program Siaran

a. Fungsi Jabatan

Membuat perencanaan program acara, perencanaan biaya siaran, koordinasi pelaksanaan, kontrol dan evaluasi progama siaran Pro1, Pro2, Pro4 di Palembang.

b. Kepala Bidang Program Siaran Berwenang

Mengusulkan dan mensosialisasikan rancangan siaran program siaran pro1, pro2, pro4 kepada semua unsur pelaksana terkait dan memberikan masukan untuk pengembangan atau inovasi program siaran.

- c. Kepala Bidang Program Siaran bertugas sebagai berikut
 - 1) Menyusun perencanaan siaran tahunan, bulanan, mingguan, dan harian program 1,2,4.
 - 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi baik formatif maupun sumatif terhadap siaran program 1,2,4.
 - 3) Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan langsung.

7. Kepala Bidang pemberitaan

- a. Fungsi Jabatan

Mengelola atau merencanakan, mengorganisasi segala sumber daya, memimpin sesuai porsi tanggung jawab serta mengevaluasi berita RRI stasiun Palembang secara efektif, efisien dan akuntabilitas.
- b. Kepala Bidang Pembertiaan Berwenang

Memonitor pelaksanaan produksi dan memberikan koreksi, menyetujui dan menolak usulan kerabat kerja bidang pemberitaan, memberikan persetujuan untuk usulan cuti, izin, dinas dari bawahan.
- c. Kepala Bidang Pemberitaan bertugas sebagai berikut
 - 1) Merencanakan produksi acara siaran berita dan non berita
 - 2) Melakukan fungsi pembinaan bawahan
 - 3) Melaksanakan dan mengawasi kegiatan produksi pemberitaan

8. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Programa

a. Fungsi Jabatan

Melakukan penyusunan program, anggaran siaran, lalu lintas siaran (trafic), pola acara dan evaluasi program siaran untuk programa 1,2,4 di RRI Palembang.

b. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Programa Berwenang

Memberikan usulan terhadap penggunaan perangkat pendukung siaran, memberikan usulan untuk pengembangan atau inovasi program siaran.

c. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Programa bertugas sebagai berikut

- 1) Melaporkan pelaksanaan tugas baik lisan maupun tulisan
- 2) Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan pelaksanaan dokumentasi siaran, rekapitulasi lagu/musik sesuai ketentuan dan aplikasi pelaporan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan langsung.

9. Kepala Seksi Programa 1

a. Fungsi Jabatan

Melakukan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan siaran berita dan informasi budaya, hiburan, pendidikan, iklan dan promo serta pengelolaan komunitas siaran programa 1,2,4 RRI Palembang.

b. Kepala Seksi Programa 1 Berwenang

Mengajukan jadwal dinas unsur pendukung programa 1 kepada bidang programa siaran, mengajukan usulan SDM dan perangkat untuk programa 1.

c. Kepala Seksi Programa 1 bertugas sebagai berikut

- 1) Menyusun perencanaan, pengelolaan dan evaluasi siaran berita budaya, hiburan, pendidikan, iklan dan promo.
- 2) Memeriksa laporan bulanan dan spesifikasi programa 1
- 3) Menyusun laporan penyelenggaraan siaran programa 1

10. Kepala Seksi Programa 2

a. Fungsi Jabatan

Melakukan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan siaran berita dan informasi budaya, hiburan, pendidikan, iklan dan promosi serta pengelolaan komtinuitas siaran programa 2 RRI Palembang.

b. Kepala Seksi Programa 2 Berwenang

Mengajukan jadwal dinas unsur pendukung penyiaran programa 2 kepada kepala bidang programa siaran, mengajukan usulan SDM dan perangkat untuk Programa 2.

c. Kepala Seksi Programa 2 bertugas sebagai berikut

- 1) Menyusun perencanaan pola dan rencana biaya siaran pro2 selama 1 tahun
- 2) Memonitor program acara siaran pro2
- 3) Membuat laporan bulanan dan spesifikasi pro2

11. Kepala Seksi program 4

a. Fungsi Jabatan

Melakukan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan siaran berita dan informasi budaya, hiburan, pendidikan, iklan, dan promosi serta pengelolaan kontinuitas siaran program 4 RRI Palembang.

b. Kepala Seksi Program 4 Berwenang

Mengajukan judul dinas unsur pendukung penyiaran program 4 kepada kepala bidang program siaran, mengajukan usulan SDM dan perangkat untuk program 4.

c. Kepala Seksi Program 4 bertugas sebagai berikut

- 1) Menyusun dan mengikuti perumusan permulaan program acara program 1
- 2) Melakukan evaluasi dan menyetujui daftar acara siaran pro4
- 3) Memeriksa laporan bulanan dan spesifikasi program 4.

12. Kepala seksi Liputan Olahraga

a. Fungsi Jabatan

Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi siaran berita olahraga di RRI Palembang

b. Kepala Seksi Liputan Olahraga Berwenang

Jadwal dinas tugas reporter dan desk olahraga, memberikan usulan penghargaan untuk bawahan yang berprestasi.

c. Kepala Seksi Liputan Olahraga bertugas sebagai berikut

- 1) Melaksanakan rapat agenda setting
- 2) Membimbing reporter meliput berita olahraga
- 3) Memonitor pelaksanaan program siaran berita olahraga

13. Kepala Bidang Teknologi dan Media Baru

a. Fungsi Jabatan

Membantu direktur teknik dalam melaksanakan, memimpin dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan teknologi dan media baru RRI Palembang.

b. Kepala Bidang Teknologi Media Baru Berwenang

Mengkoordinasikan penyusunan pedoman kerja dibidang teknologi dan media baru, mengevaluasi kinerja staff dilingkungan bidang teknologi dan media baru.

c. Kepala Bidang Teknologi dan Media Baru bertugas sebagai berikut

- 1) Berkoordinasi dengan bidang lain dari menganalisa rencana kerja/program.
- 2) membuat pelatihan yang perlu untuk bawahan
- 3) menyusun anggran untuk pelaksanaan dan pemeliharaan peralatan/fasilitas teknik

14. Kepala Seksi Teknik Transmisi dan Distribusi

a. Fungsi Jabatan

Melakukan pengoperasian, pengawasan, pemeliharaan pemancar

b. Kepala Seksi Teknik Transmisi dan Distribusi Berwenang

Bertanggung jawab atas pemancar sesuai SOP, melakukan pemeliharaan rutin.

c. Kepala Seksi Teknik Transmisi dan Distribusi bertugas sebagai berikut

- 1) Menghidupkan peralatan pemancar sesuai SOP
- 2) Mencatat meter dan kondisi peralatan pemancar
- 3) Mengoperasikan peralatan stasioner (pemancar dan downlink)

15. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Siaran

a. Fungsi Jabatan

Membantu memimpin dalam menyediakan data dan informasi dalam mengelola data komunikasi public, informasi dan publikasi serta melakukan berbagai tugas yang berhubungan data komunikasi publik, informasi dan publikasi.

b. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Siaran Berwenang

Mengumpulkan serta mengelola data komunikais publik informasi dan publikasi, menyiapkan dokumen dan laporan pengelolaan data komunikasi publik informasi dan publikasi

c. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Siaran bertugas sebagai berikut

- 1) Membantu menyiapkan rencana kegiatan kerjasama pembuatan logo, iklan hard sell di media lain.
- 2) Membantu menyusun dokumen komunikasi publik
- 3) Membantu mengkoordinasikan kegiatan LPU off air didalam dan diluar RRI

16. Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha

a. Fungsi Jabatan

Membantu Kepala RRI dalam melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis evaluasi dibidang layanan pengembangan usaha.

b. Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha Berwenang

Memberikan masukan mengenai rencana program kegiatan yang berhubungan dengan program layanan dan pengembangan usaha, memonitor pelaksanaan program kegiatan dan memberikan koreksi.

c. Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan usaha bertugas sebagai berikut

- 1) Operasionalisasi organisasi pada bidang layanan dan pengembangan usaha
- 2) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang layanan dan pengembangan usaha
- 3) Terumusnya rencana dan program bidang layanan serta pengembangan usaha.

17. Kepala Seksi Layanan Publik

a. Fungsi Jabatan

Membantu Kepala RRI dalam melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis evaluasi dibidang layanan publik.

b. Kepala Seksi Layanan Publik Berwenang

Memberikan persetujuan untuk usulan cuti, izin, dinas dari bawahan, memberikan penilaian kepada karyawan (SKP)

c. Kepala Seksi Layanan Publik bertugas sebagai berikut

- 1) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi layanan publik
- 2) Tersedianya data dan informasi layanan publik
- 3) Tersedianya kegiatan layanan publik baik off air maupun on air

18. Kepala Seksi Komunikasi Publik

a. Fungsi Jabatan

Membantu Kepala RRI dalam melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis evaluasi dibidang komunikasi publik.

b. Kepala Seksi Komunikasi Publik Berwenang

Melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal serta melakukan pembinaan dibidang komunikasi publik, memberikan penilaian kepada bawahan (SKP)

c. Kepala Seksi Komunikasi Publik bertugas sebagai berikut

- 1) Terumusnya rencana dan program komunikasi publik
- 2) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di seksi komunikasi publik
- 3) Terselenggaranya kegiatan promosi, hubungan dengan mediaserta pengelola informasi dan dokumentasi

G. Peran dan Prinsip LPP RRI

1) Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat

RRI menyelenggarakan siaran pemberdayaan masyarakat di semua lapisan masyarakat melalui siaran pedesaan, nelayan, wanita, anak-anak, siaran lingkungan hidup, kewirausahaan, teknologi tepat guna, kerajinan, perdagangan, pertanian, koperasi, industri kecil dll.

2) Peran RRI sebagai Pelestari Budaya Bangsa

Seluruh RRI wajib menyelenggarakan siaran seni dan budaya daerah seluruh indonesia secara konsisten dan tidak pernah berhenti seperti siaran ketoprak, wayang orang, wayang golek, madihin, saluang dan budaya minang lainnya, budaya bugis, dan budaya daerah-daerah lainnya.

3) Peran RRI sebagai pelestari lingkungan

RRI menyelenggarakan siaran *Green Radio* untuk penanaman kembali dan *Re Use, Reduce* dan *Recycling* dengan berbagai format dan variasi bentuk acara.

4) Peran RRI sebagai media pendidikan

RRI menyelenggarakan siaran pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai Mahasiswa. RRI menyelenggarakan Pekan Kreatif dengan

mengadakan lomba kreatif remaja seperti lomba cipta lagu, lomba cipta design , lomba IT, lomba band indie, bintang radio, pekan tilawatil quran. Disamping itu juga menyelenggarakan siaran pendidikan social masyarakat, seperti siaran wanita, siaran pedesaan, siaran KB dll.

5) Peran RRI sebagai Media Diplomasi

RRI menyelenggarakan siaran radio diplomasi melalui siaran luar negeri untuk membangun citra positif bangsa didunia internasional bekerjasama dengan kedutaan dan radio luar negeri dengan siaran yang bersifat reciprocal . kerjasama siaran dengan ABC , NHK, RTM, RTB, KBS, RTH, SR, BBC, Radio Jedah, Radio Turki, RCI, DW dll.

6) Peran RRI sebagai media terdepan tanggap bencana

RRI menyelenggarakan siaran langsung dari tenda darurat melalui Radio *Based Disaster Management*. Setiap ada bencana dalam waktu tidak lebih dari 24 jam RRI harus sudah melaporkan, kemudian diikuti program Pelipur Lara korban bencana dan trauma healing dengan mendirikan studio darurat.

7) Peran RRI dalam menghubungkan tenaga kerja di Luar Negeri

RRI menyelenggarakan siaran rutin dan terkoneksi dengan 7 negara yaitu Hongkong, Malaysia, Brunei Darusalam, Jepang, Taiwan, Korea dan Arab Saudi untuk mendekatkan TKI dengan kampung halaman. Pendengar RRI di luar negeri khususnya TKI berjumlah puluhan ribu orang yang mendengar melalui audio streaming. Dalam rangka mewujudkan peran *second track diplomacy* menyelenggarakan acara *Diplomatic Forum*.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di Luar negeri khususnya tenaga kerja Indonesia antara lain diselenggarakan acara bilik sastra yang diperlombakan dan 2 pemenang dihadirkan oleh SLN untuk menghadiri acara upacara kenegaraan 17 Agustus di Istana negara dan sidang DPR dan DPD di Senayan.

8) **Peran RRI sebagai media hiburan**

RRI menyelenggarakan siaran hiburan berupa siaran music dan kata, pagelaran musik klasik yaitu orkes symphony Jakarta dan orkes symphony yang dimiliki RRI daerah. Pagelaran kesenian dan budaya, lawak, Quiz dll.

9) **Peran RRI dalam sabuk pengaman informasi (Information Safety Belt)**

selama tahun 2009 - 2010 RRI telah mendirikan studio di wilayah perbatasan dan daerah terpencil atau blankspot, antara lain: Entikong, Batam, Nunukan, Putusibaou, Malinau, Atambua, Ampana, Boven Digoel, Kaimana, Skow, Oksibil, Takengon, Sabang dan Sampang. Siaran melalui studio-studio produksi ini ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan memberikan akses informasi yang berimbang bagi masyarakat di daerah perbatasan maupun di daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat menerima siaran RRI atau blankspot.⁴

⁴<http://rri.co.id/profil.html>, diakses 7 Februari 2019, 17:14

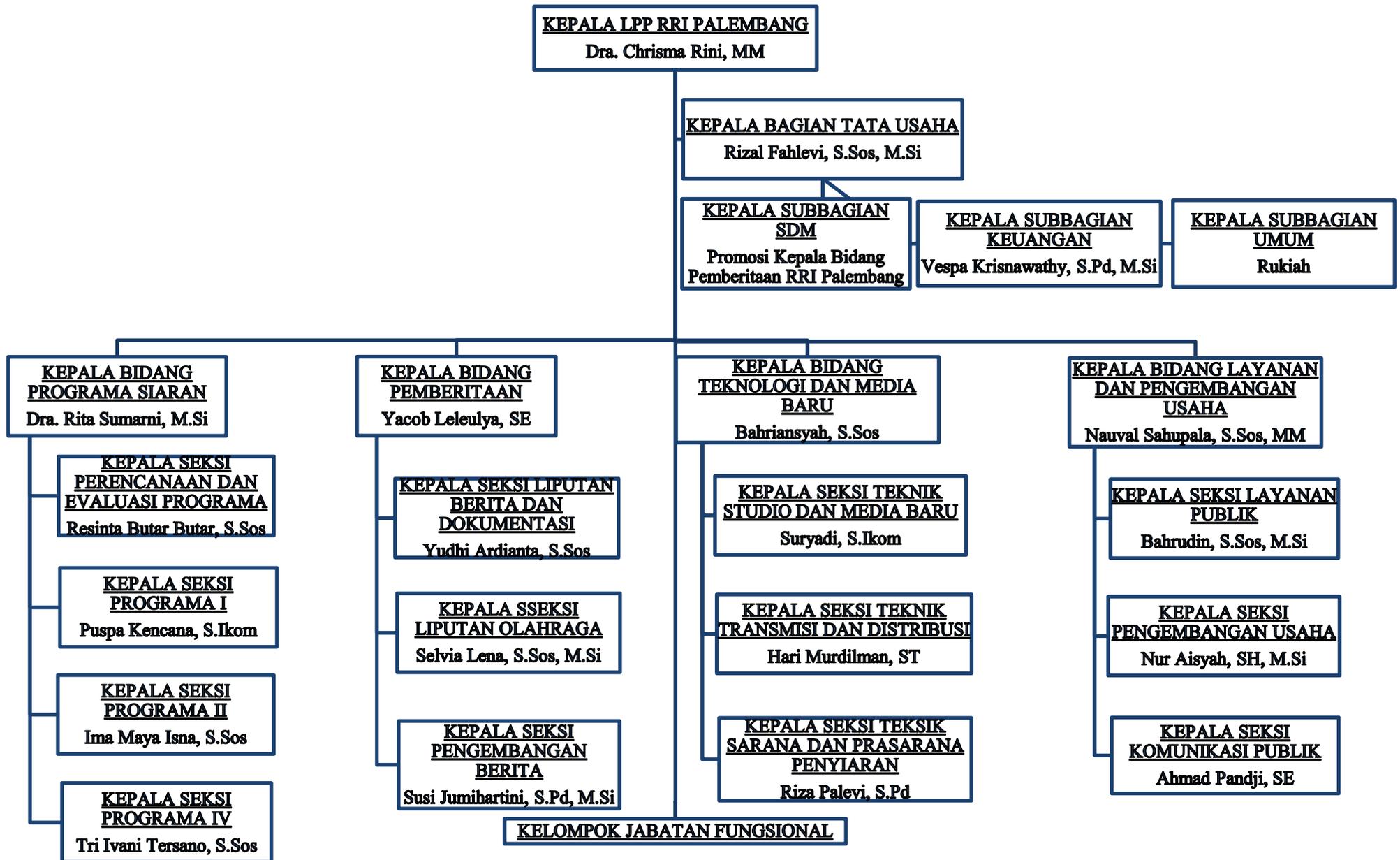
Prinsip Lembaga Penyiaran Publik:

1. Lpp adalah lembaga penyiaran untuk semua warga negara
2. Siarannya harus menjangkau seluruh wilayah negara
3. Siarannya harus merefleksikan keberagaman
4. Siarannya harus berbeda dengan lembaga penyiaran lainnya
5. Lpp harus menegakkan independensi dan netralitas
6. Siarannya harus bervariasi dan berkualitas tinggi
7. Menjadi *flag carrier* dari bangsa Indonesia
8. Mencerminkan identitas bangsa
9. Perikat dan pemersatu bangsa

Sebagai sumber informasi terpercaya sesuai dengan prinsip lembaga penyiaran publik, dalam menyelenggarakan siaran RRI berpedoman pada nilai-nilai standar penyiaran :

1. Siaran bersifat independet dan netral
2. Siaran harus memihak pada kebenaran
3. Siaran memberi pemahaman
4. Siaran mengurangi ketidakpastian
5. Siaran berpedoman pada Pancasila, UUD 1945 dan kebenaran, serta peraturan yang lainnya.
6. Siaran harus memihak hanya kepada kepentingan NKRI
7. Siaran harus menjaga persatuan, kesatuan dan Kedaulatan NKRI⁵

⁵ Ibid



Bagan 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kelola RRI Palembang

